



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2026

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

KATA PENGANTAR ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 2

1.4. Sistematika 5

BAB II 6

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2026..... 7

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2026..... 7

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah..... 33

2.3. Reviu Terhadap Renja Tahun 2026 35

BAB III 52

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 52

BAB IV 84

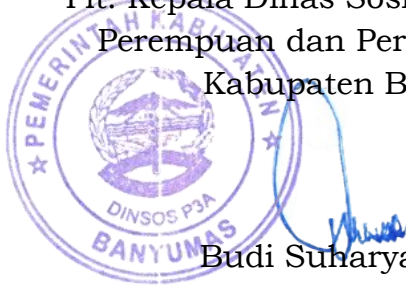
PENUTUP 84

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Anggaran DinsosP3A Kabupaten Banyumas tahun 2026 telah selesai disusun. RENJA Perubahan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Perubahan tahun 2026 ini berisi evaluasi kinerja tahun 2026 sebelum perubahan anggaran tahun 2026 yang belum dapat diselesaikan dan perencanaan yang lebih detail dan terukur dalam rencana kerja perubahan anggaran tahun 2026. Akhirnya, semoga segala sesuatu yang direncanakan dalam Rencana Kerja Perubahan ini dapat terealisasi dengan baik. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Purwokerto, 8 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyumas



Budi Suharyanto, S.H.
NIP. 196905251990021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah. Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Sesuai amanat tersebut maka DinsosP3A Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan DinsosP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026, Surat Edaran Nomor 000.9/2305/V/2026 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Banyumas No 3 Tahun 2026 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6)
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 110);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026.
27. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan DinsosP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah:

1. Menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DinsosP3A sampai dengan triwulan II Tahun 2026 sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian perencanaan tahun berjalan.
2. Melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian dan kebutuhan pendanaan tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja serta perubahan kebijakan pembangunan daerah.
3. Menyelaraskan rencana kerja DinsosP3A dengan perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sedangkan tujuan:

1. Mengetahui capaian pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan realisasi pendanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2026 serta mengidentifikasi faktor pendukung, kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Merumuskan hasil rewiu dan penyesuaian terhadap target kinerja serta kebutuhan pendanaan Tahun 2026 agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi aktual.
3. Menjadi pedoman DinsosP3A dalam melaksanakan program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja anggaran perubahan 2026.
4. Mendukung keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Banyumas.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1 Latar Belakang memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan dengan Dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah
- 1.2 Landasan Hukum, Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen/substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan Analisis Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Utama / Tujuan dan Sasaran sampai dengan TW II Tahun 2026.
 - b. Capaian Kinerja Program s.d. Sub Kegiatan sampai dengan TW II Tahun 2026
 - c. Capaian Kinerja Keuangan s.d. TW II Tahun 2026
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.3 Reviu terhadap Renja Tahun 2026, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II dan analisis kebutuhan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan , Memuat matrik perubahan renja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2026
- 3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berisi indikator kinerja kunci perangkat daerah tahun 2026

BAB IV PENUTUP,

Berisi uraian penjelasan dan kesimpulan atas penyusunan dokumen perubahan renja perangkat daerah tahun 2026.

LAMPIRAN

Berisi register risiko dan rencana penanganan risiko operasional perubahan tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2026

Rencana Kerja DinsosP3A Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DinsosP3A Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2026 sampai dengan Triwulan II. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2026, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Analisis capaian kinerja DinsosP3A sampai dengan Triwulan II tahun 2026 berkenaan sebagai berikut :

A. Tabel Capaian Kinerja Utama / Tujuan dan Sasaran sampai dengan TW II Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target kinerja renja tahun berjalan 2026	Realisasi kinerja pada triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2026	Permasalahan	Keterangan
Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS serta Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100		
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65,4	N/A	N/A		
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	63,5	N/A	N/A		
	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90,05	N/A	N/A		
Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,209-0,196	N/A	N/A		
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/Kota	%	100	100	100		
	Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Angka	5,28	N/A	N/A		
Cakupan jenis PPKS yang tertangani	Persentase Jenis PPKS yang tertangani	%	100	23	23		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80	N/A	N/A		
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,42	N/A	N/A		
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,6	N/A	N/A		

B. Tabel Capaian Kinerja Program s.d. Sub Kegiatan sampai dengan TW II Tahun 2026

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026											Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.		
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung				Faktor Penghambat				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K		%	
PROGR AM 1	PROGRAM: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					442.010.000		N/A		6.563.000		-		-		6.563.000		0.63							
1.1	Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan	%	75,21	N/A	75,21		74,25		74,5		-		-		74,5		99.06		SANGAT TINGGI	99.06	SANGAT TINGGI				
1.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50,67	N/A	50,67		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A				
1.3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	58,9	N/A	58,9		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A				
KEGIA TAN 15	KEGIATAN: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A							
1.1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	N/A	100		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A				
SUB KEGIA TAN 64	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					30.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A							
1.1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	N/A	2		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A				
SUB KEGIA TAN 65	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A							
1.1	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	2	N/A	2		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A				
KEGIA TAN 16	KEGIATAN: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					362.010.000		N/A		6.563.000		-		-		6.563.000		0.77							
1.1	Jumlah Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan	Organisasi	38	N/A	38		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A				
SUB KEGIA TAN 66	SUB KEGIATAN: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					300.000.000		N/A		6.563.000		-		-		6.563.000		0.93							
1.1	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg	Lembaga	38	N/A	39		39		0		-		-		0		100.00		SANGAT	102.63	SANGAT				

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026											Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.	
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung				Faktor Penghambat			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K		%
	diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi																	TINGGI		TINGGI				
SUB KEGIATAN 67	SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					62.010.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	160	N/A	270		N/A		105		-		-		105	525.00		SANGAT TINGGI	65.63	SEDANG			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 105 ORANG Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender Tahun 2026 dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Hukum Tahun 2026	
KEGIATAN 17	KEGIATAN: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	%	21	N/A	21		N/A		N/A		-		-		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A				
SUB KEGIATAN 68	SUB KEGIATAN: pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota					15.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	13	N/A	13		N/A		N/A		-		-		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A				
SUB KEGIATAN 69	SUB KEGIATAN: penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota					15.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1	N/A	1		N/A		N/A		-		-		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A				
PROGRAM 2	PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					172.500.000		6.600.000		127.366.500		-		-		127.366.500	55.05							

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026											Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.	
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung				Faktor Penghambat			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%								
1.1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	N/A	100		100		100		-		-		100		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
KEGIA TAN 18	KEGIATAN: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					51.000.000		6.600.000		48.504.000		-		-		48.504.000		82.16						
1.1	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kasus	47	N/A	47		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIA TAN 70	SUB KEGIATAN: Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIA TAN 71	SUB KEGIATAN: Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					51.000.000		6.600.000		48.504.000		-		-		48.504.000		82.16						
1.1	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	27	N/A	27		N/A		5		-		-		5		100.00		SANGAT TINGGI	18.52	SANGAT RENDAH			
KEGIA TAN 19	KEGIATAN: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					121.500.000		N/A		78.862.500		-		-		78.862.500		43.67						
1.1	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Lembaga	1	N/A	1		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIA TAN 72	SUB KEGIATAN: Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					116.500.000		N/A		78.862.500		-		-		78.862.500		45.55						
1.1	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	1	N/A	1		1		1		-		-		1		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
SUB KEGIA TAN 73	SUB KEGIATAN: Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
1.1	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1	N/A	1		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
PROGRAM 3	PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					25.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Persentase keluarga pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,035	N/A	0,035		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
KEGIATAN 20	KEGIATAN: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Kegiatan	1	N/A	1		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 74	SUB KEGIATAN: Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.					25.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	45	N/A	25		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
PROGRAM 4	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	55,55	N/A	48,27		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
KEGIATAN 21	KEGIATAN: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan	Perangkat Daerah	15	N/A	15		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
SUB KEGIATAN 75	SUB KEGIATAN: Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	N/A	1		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
PROGRAM 5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					140.000.000		N/A		100.000		-		-		100.000		0.07						
1.1	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang telah mendapatkan advokasi komponen pemenuhan hak anak	%	86	N/A	86		30		70		-		-		70		73.68		SEDANG	81.40	TINGGI			
KEGIATAN 22	KEGIATAN: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					40.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	Kegiatan	2	N/A	2		N/A		2		-		-		2		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak 2 keg
SUB KEGIATAN 76	SUB KEGIATAN: Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					25.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	28	N/A	27		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 77	SUB KEGIATAN: Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					15.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	27	N/A	27		N/A		6		-		-		6		22.22		SANGAT RENDAH	22.22	SANGAT RENDAH			

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%								
KEGIA TAN 23	KEGIATAN: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000		N/A		100.000		-		-		100.000		0.10						
1.1	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	Perangkat Daerah	25	N/A	25		N/A		19		-		-		19		76.00		TINGGI	76.00	TINGGI			Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak 19 Perangkat Daerah
SUB KEGIA TAN 78	SUB KEGIATAN: Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000		N/A		100.000		-		-		100.000		0.10						
1.1	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	25	N/A	27		N/A		19		-		-		19		70.37		SEDANG	76.00	TINGGI			
PROGR AM 6	PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					188.860.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	N/A	100		100		100		-		-		100		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
KEGIA TAN 24	KEGIATAN: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					119.500.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembaga	3	N/A	3		N/A		2		-		-		2		66.67		SEDANG	66.67	SEDANG			Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak 2 Lembaga
SUB KEGIA TAN 79	SUB KEGIATAN: koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota					68.500.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	3	N/A	2		N/A		2		-		-		2		100.00		SANGAT TINGGI	66.67	SEDANG			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 2 dok Dokumen hasil koordinasi persiapan kegiatan di Kecamatan Berdaya, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pencegahan Kekerasan

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026											Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung				Faktor Penghambat		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%							
																					terhadap Anak bagi Satgas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPIA)		
SUB KEGIATAN 80	SUB KEGIATAN: Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					51.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A					
1.1	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1	N/A	27		N/A		2		-		-		2	40.00		SANGAT RENDAH	200.00	SANGAT TINGGI		Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 2 KEG. Peningkatan Kapasitas Pencegahan Pergaulan Bebas dan Perkawinan Anak di Kec. Rawalo dan Patikraja	
KEGIATAN 25	KEGIATAN: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					69.360.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A					
1.1	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	1	N/A	1		N/A		N/A		-		-		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 81	SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai					69.360.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A					
1.1	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	120	N/A	115		N/A		N/A		-		-		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			
PROGRAM 7	PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					85.000.000		6.790.000		20.951.500		-		-		20.951.500		4.83					
1.1	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	100	N/A	100		100		100		-		-		100	100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
1.2	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan Sosial	%	57	N/A	57		N/A		58		-		-		58	101.75		SANGAT TINGGI	101.75	SANGAT TINGGI			
KEGIATAN 26	KEGIATAN: Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A					
1.1	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
SUB KEGIATAN 84	SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 85	SUB KEGIATAN: Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
KEGIATAN 7	KEGIATAN: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					85.000.000		6.790.000		20.951.500		-		-		20.951.500		4.83						
1.1	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan	Lembaga	7	N/A	7		N/A		5		-		-		5		100.00		SANGAT TINGGI	71.43	SEDANG			
SUB KEGIATAN 22	SUB KEGIATAN: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 23	SUB KEGIATAN: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		6.790.000		16.846.000		-		-		16.846.000		33.69						
1.1	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	5	N/A	5		3		3		-		-		3		120.00		SANGAT TINGGI	120.00	SANGAT TINGGI			
SUB KEGIATAN 24	SUB KEGIATAN: Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					15.000.000		N/A		1.765.500		-		-		1.765.500		11.77						
1.1	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	N/A	10		N/A		10		-		-		10		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			Pelaksanaan Homevisit atau kunjungan rumah ke PMKS untuk bimbingan dan konseling
SUB KEGIATAN 25	SUB KEGIATAN: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000		N/A		2.340.000		-		-		2.340.000		23.40						

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TDW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
1.1	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	6	N/A	6		N/A		2		-		-		2		33.33		SANGAT RENDAH	33.33	SANGAT RENDAH			Koordinasi terkait IPSM dan fasilitasi bintek penyuluh sosial
PROGR AM 8	PROGRAM: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					863.400.000		37.225.000		184.085.300		-		-		184.085.300	6.54							
1.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	N/A	100		100		100		-		-		100		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
1.2	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	56,7	N/A	56,7		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
1.3	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia	Indeks	54,31	N/A	54,31		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
KEGIATAN 8	KEGIATAN: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					818.400.000		37.225.000		178.985.300		-		-		178.985.300	6.90							
1.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	210	N/A	210		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
1.2	Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	53	N/A	53		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
1.3	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	88	N/A	50		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 26	SUB KEGIATAN: Penyediaan Permakanan					330.000.000		30.300.000		122.764.800		-		-		122.764.800	11.19							
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	N/A	300		44		114		-		-		114		45.14		SANGAT RENDAH	45.14	SANGAT RENDAH			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota. 114 ORANG
SUB KEGIATAN 27	SUB KEGIATAN: Penyediaan Sandang					50.000.000		N/A		7.240.000		-		-		7.240.000	14.48							
1.1	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	N/A	150		172		N/A		-		-		172		114.67		SANGAT TINGGI	114.67	SANGAT TINGGI			
SUB KEGIATAN 28	SUB KEGIATAN: Penyediaan Alat Bantu					200.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A	N/A							

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	N/A	30		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 29	SUB KEGIATAN: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					20.000.000		N/A		6.300.000		-		-		6.300.000		16.50						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	N/A	10		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 30	SUB KEGIATAN: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					108.400.000		N/A		28.652.000		-		-		28.652.000		5.58						
1.1	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	N/A	50		34		12		-		-		12		92.00		SANGAT TINGGI	92.00	SANGAT TINGGI			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota 12 ORANG
SUB KEGIATAN 31	SUB KEGIATAN: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					25.000.000		6.925.000		13.028.500		-		-		13.028.500		11.80						
1.1	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	N/A	10		107		8		-		-		8		1.150.00		SANGAT TINGGI	1.150.00	SANGAT TINGGI			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 8 ORANG
SUB KEGIATAN 32	SUB KEGIATAN: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					10.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	N/A	6		29		8		-		-		8		616,67		SANGAT TINGGI	370.00	SANGAT TINGGI			Form Input Realisasi Indikator x TAHAPAN :INDUK PAGU: Rp 10.000.000 Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Satuan Tipe Perhitungan Formulasi/Keterangan Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
																					Kabupaten/Kota = 6 ORANG pengantaran PM ke panti pelatihan			
SUB KEGIATAN 33	SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A	N/A	N/A					
SUB KEGIATAN 34	SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Kedaruratan					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	N/A	10		12		10		-		-		10	220.00		SANGAT TINGGI	220.00	SANGAT TINGGI	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 ORANG			
SUB KEGIATAN 35	SUB KEGIATAN: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					10.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	N/A	5		29		98		-		-		98	2,540.00		SANGAT TINGGI	84.67	TINGGI	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 98 ORANG			
SUB KEGIATAN 36	SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Rujukan					50.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	N/A	5		25		13		-		-		13	760.00		SANGAT TINGGI	190.00	SANGAT TINGGI	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 13 ORANG			
SUB KEGIATAN 37	SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000		N/A		1.000.000		-		-		1.000.000	10.00							
1.1	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	N/A	10		27		6		-		-		6	330.00		SANGAT TINGGI	330.00	SANGAT TINGGI	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 6 ORANG			
KEGIATAN 9	KEGIATAN: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					45.000.000		N/A		5.100.000		-		-		5.100.000	11.33							

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
	Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																							
1.1	Presentase PPKS lainnya yang mendapat fasilitas rehabilitasi sosial	%	100	N/A	100		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 38	SUB KEGIATAN: Penyediaan Permakanan					10.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	N/A	25		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 39	SUB KEGIATAN: Penyediaan Sandang					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 40	SUB KEGIATAN: Penyediaan Alat Bantu					10.000.000		N/A		3.850.000		-		-		3.850.000		38.50						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 41	SUB KEGIATAN: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 42	SUB KEGIATAN: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					5.000.000		N/A		1.250.000		-		-		1.250.000		25.00						
1.1	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 43	SUB KEGIATAN: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
SUB KEGIATAN 44	SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					3.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A	N/A	N/A					
SUB KEGIATAN 45	SUB KEGIATAN: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					3.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	N/A	4		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A	N/A	N/A					
SUB KEGIATAN 46	SUB KEGIATAN: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					3.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A	N/A	N/A					
SUB KEGIATAN 47	SUB KEGIATAN: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					3.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A	N/A	N/A					
SUB KEGIATAN 48	SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Rujukan					3.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	N/A	10		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A	N/A	N/A					
SUB KEGIATAN 49	SUB KEGIATAN: Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	1	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A	N/A	N/A					
SUB KEGIATAN 82	SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 83	SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Kedaruratan				-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A							
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
PROGRAM 9	PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					3.503.983.700		245.834.400		667.710.252		-		-		667.710.252		0.51						
1.1	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	%	71,01	N/A	71,01		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
KEGIATAN 10	KEGIATAN: Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					25.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah penerima layanan perlindungan sosial bagi anak terlantar	Orang	25	N/A	25		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 50	SUB KEGIATAN: Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					15.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 51	SUB KEGIATAN: Rujukan Anak-Anak Terlantar					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	N/A	5		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 52	SUB KEGIATAN: Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	N/A	10		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
KEGIATAN 11	KEGIATAN: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					3.478.983.700		245.834.400		667.710.252		-		-		667.710.252		0.52						
1.1	Jumlah fakir miskin yang terdata	Orang	60.000	N/A	48.000		40.456		8,593		-		-		8,593		67.44		SEDANG	67.44	SEDANG			Jumlah data fakir miskin april = 2691 mei = 2514 juni = 3388 total = 8.593 data pbi, desil 1,2,3,4
SUB KEGIATAN 53	SUB KEGIATAN: Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					10.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	N/A	100		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026											Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung				Faktor Penghambat		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	
SUB KEGIATAN 54	SUB KEGIATAN: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					2.924.983.700		245.834.400		644.532.952		-		-		644.532.952		0.36					
1.1	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.750	N/A	1.750		N/A		N/A		-		-		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota= 1. penyaluran bansos penderes
SUB KEGIATAN 55	SUB KEGIATAN: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					544.000.000		N/A		23.177.300		-		-		23.177.300		1.39					
1.1	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	13.000	N/A	13.000		50.562		21.337		-		-		21.337	553.07		SANGAT TINGGI	553.07	SANGAT TINGGI			
PROGRAM 10	PROGRAM: PROGRAM PENANGANAN BENCANA					170.000.000		N/A		15.802.783		-		-		15.802.783		0.63					
1.1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	%	100	N/A	100		100		100		-		-		100	100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
KEGIATAN 12	KEGIATAN: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					115.000.000		N/A		14.303.000		-		-		14.303.000		0.93					
1.1	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Orang	300	N/A	300		N/A		126		-		-		126	42.00		SANGAT RENDAH	42.00	SANGAT RENDAH			Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota = absolut 126 orang
SUB KEGIATAN 56	SUB KEGIATAN: Penyediaan Makanan					70.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A					
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	N/A	250		116		3		-		-		3	74.38		SEDANG	47.60	SANGAT RENDAH			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 orang
SUB KEGIATAN 57	SUB KEGIATAN: Penyediaan Sandang					25.000.000		N/A		14.303.000		-		-		14.303.000		4.27					
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	Orang	100	N/A	100		41		3		-		-		3	44.00		SANGAT	44.00	SANGAT			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%								
	Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota																	REND AH		REND AH			yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 orang	
SUB KEGIATAN 58	SUB KEGIATAN: Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	N/A	20		47		1		-		-		1	240.00		SANG AT TINGGI	240.00	SANG AT TINGGI			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 orang	
SUB KEGIATAN 59	SUB KEGIATAN: Pelayanan Dukungan Psikososial					5.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	N/A	40		11		3		-		-		3	93.33		SANG AT TINGGI	35.00	SANG AT REND AH			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 3 orang	
SUB KEGIATAN 60	SUB KEGIATAN: Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					10.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	N/A	50		70		3		-		-		3	292.00		SANG AT TINGGI	146.00	SANG AT TINGGI				
KEGIATAN 13	KEGIATAN: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					55.000.000		N/A		1.499.783		-		-		1.499.783		2.73						
1.1	Jumlah pembinaan kampung siaga bencana	Kampung	4	N/A	4		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 61	SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					15.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	2	N/A	2		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 62	SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					40.000.000		N/A		1.499.783		-		-		1.499.783		3.75						
1.1	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	102	N/A	102		3		3		-		-		3	5.88		SANG AT REND AH	5.88	SANG AT REND AH				
PROGRAM 11	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					70.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026											Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.	
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung				Faktor Penghambat			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%								
1.1	Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	%	100	N/A	100		100		100		-		-		100		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
KEGIATAN 14	KEGIATAN: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					70.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Makam	865	N/A	865		865		865		-		-		865		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
SUB KEGIATAN 63	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					70.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	865	N/A	865		865		865		-		-		865		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
PROGRAM 12	PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.699,251.319		1.791.348.261		3.948.949.359		-		-		3.948.949.359		9,38						
1.1	IKM Perangkat Daerah	Angka	84,07	N/A	84,07		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
1.2	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95,5	N/A	90		13,02		20,92		-		-		20,92		23.24		SANGAT RENDAH	21.91	SANGAT RENDAH			
1.3	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	80	N/A	80		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
1.4	Nilai kematangan organisasi	Angka	46	N/A	46		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
1.5	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	N/A	100		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
KEGIATAN 1	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.558.683.652		1.538.514.956		3.191.414.564		-		-		3.191.414.564		10.57						
1.1	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	N/A	100		100		100		-		-		100		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
1.2	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	N/A	100		100		100		-		-		100		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
SUB KEGIATAN 1	SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.438.923.652		1.538.514.956		3.166.769.564		-		-		3.166.769.564		10.74						
1.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	48	N/A	54		54		52		-		-		52		208.00		SANGAT TINGGI	108.33	SANGAT TINGGI			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, 52 orang (pensiun 2 orang)
SUB KEGIATAN 2	SUB KEGIATAN: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					119.760.000		N/A		24.645.000		-		-		24.645.000		20.58						

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026											Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.	
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung				Faktor Penghambat			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K		%
1.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	N/A	4		1		1		-		-		1		50.00		SANGAT RENDAH	50.00	SANGAT RENDAH			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN = 1
KEGIATAN 2	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah					450.480.545		20.173.000		126.645.800		-		-		126.645.800		15.62						
1.1	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	N/A	100		16		20,82		-		-		20,82		20.82		SANGAT RENDAH	20.82	SANGAT RENDAH			
1.2	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Nilai	39	N/A	39		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 3	SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.000.000		N/A		12.448.500		-		-		12.448.500		41.50						
1.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	N/A	4		2		0		-		-		0		50.00		SANGAT RENDAH	100.00	SANGAT TINGGI			
SUB KEGIATAN 4	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.954.700		N/A		30.462.500		-		-		30.462.500		84.72						
1.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	N/A	6		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 5	SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					123.100.000		N/A		38.690.500		-		-		38.690.500		31.43						
1.1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	N/A	10		2		N/A		-		-		2		20.00		SANGAT RENDAH	100.00	SANGAT TINGGI			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket belanja perabot kantor dan rumah singgah
SUB KEGIATAN 6	SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor					73.570.000		N/A		2.330.300		-		-		2.330.300		3.17						
1.1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	N/A	6		1		1		-		-		1		33.33		SANGAT RENDAH	40.00	SANGAT RENDAH			
SUB KEGIATAN 7	SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					39.334.500		N/A		9.657.000		-		-		9.657.000		24.55						
1.1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	N/A	3		1		N/A		-		-		1		33.33		SANGAT RENDAH	14.29	SANGAT RENDAH			
SUB KEGIATAN 8	SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					145.521.345		20.173.000		33.057.000		-		-		33.057.000		0.85						
1.1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	N/A	70		8		10		-		-		10		25.71		SANGAT RENDAH	12.00	SANGAT RENDAH			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 laporan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
																						Perjalanan Dinas Dalam Kota		
SUB KEGIATAN 9	SUB KEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	N/A	4		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
KEGIATAN 3	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					291.695.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	100	N/A	100		0		100		-		-		100		1.000.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
SUB KEGIATAN 10	SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel					130.645.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	N/A	4		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 11	SUB KEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					161.050.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	N/A	3		N/A		2		-		-		2		40.00		SANGAT RENDAH	66.67	SEDANG			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 unit Pengadaan Peralatan Komputer, Pengadaan Pompa air
SUB KEGIATAN 12	SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	N/A	1		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
KEGIATAN 4	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.791.373.840		228.405.305		514.486.195		-		-		514.486.195		5.29						
1.1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	N/A	100		25		50		-		-		50		50.00		SANGAT RENDAH	50.00	SANGAT RENDAH			
SUB KEGIATAN 13	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					372.000.000		38.758.873		74.065.855		-		-		74.065.855		3.07						
1.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	N/A	12		3		3		-		-		3		50.00		SANGAT RENDAH	50.00	SANGAT RENDAH			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan Belanja Tagihan Air, Listrik Sampah mei-juni

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	%	
SUB KEGIATAN 14	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	N/A	0		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A			
SUB KEGIATAN 15	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.419.373.840		189.646.432		440.420.340		-		-		440.420.340		5.87						
1.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	N/A	12		3		3		-		-		3		50.00		SANGAT RENDAH	50.00	SANGAT RENDAH			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n 3 laporan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (OS), PPPK Paruh Waktu, iuran jaminan Kesehatan
KEGIATAN 5	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					567.010.482		N/A		102.960.300		-		-		102.960.300		6.51						
1.1	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	70	N/A	70		N/A		50		-		-		50		71.43		SEDANG	71.43	SEDANG			
1.2	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	N/A	100		16		41		-		-		41		41.00		SANGAT RENDAH	41.00	SANGAT RENDAH			
SUB KEGIATAN 16	SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					273.555.290		N/A		90.330.300		-		-		90.330.300		13.50						
1.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	93	N/A	15		3		3		-		-		3		40.00		SANGAT RENDAH	6.45	SANGAT RENDAH			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 unit Pajak Kendaraan, Belanja bahan bakar Pelumas (PNS), Pemeliharaan Kendaraan Roda empat dan dua
SUB KEGIATAN 17	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					260.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	N/A	3		N/A		2		-		-		2		66.67		SEDANG	66.67	SEDANG			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Tahun 2026												Tingkat Capaian RKPD 2026 s.d TW II		Status Capaian 2026	Tingkat Capaian 2026 Thd RPJMD	Status Capaian 2026 Triwulan II	Identifikasi		Ket.
					Target		Realisasi Trw 1		Realisasi Trw 2		Realisasi Trw 3		Realisasi Trw 4		Realisasi 2026 s.d. Triwulan II		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%								
SUB KEGIATAN 18	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Mebel					4.000.000		N/A		N/A		-		-		N/A		N/A						
1.1	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	N/A	4		N/A		4		-		-		4		100.00		SANGAT TINGGI	200.00	SANGAT TINGGI			Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 unit Pemeliharaan Mebel
SUB KEGIATAN 19	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					29.455.192		N/A		12.630.000		-		-		12.630.000		42.88						
1.1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	N/A	7		3		1		-		-		1		57.14		RENDAH	5.71	SANGAT RENDAH			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 unit Pemeliharaan Printer dan Komputer
KEGIATAN 6	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.007.800		4.255.000		13.442.500		-		-		13.442.500		8.04						
1.1	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	N/A	N/A		100		100		-		-		100		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
1.2	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	N/A	100		100		100		-		-		100		100.00		SANGAT TINGGI	100.00	SANGAT TINGGI			
SUB KEGIATAN 20	SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					14.782.800		4.255.000		8.032.500		-		-		8.032.500		7.29						
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	N/A	4		2		2		-		-		2		100.00		SANGAT TINGGI	133.33	SANGAT TINGGI			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah DPA, RKA
SUB KEGIATAN 21	SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.225.000		N/A		5.410.000		-		-		5.410.000		8.48						
1.1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1	N/A	4		2		1		-		-		1		75.00		SEDANG	300.00	SANGAT TINGGI			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 DOK SPM

C. Tabel Capaian Kinerja Keuangan s.d. TW II Tahun 2026

No.	Nama Program	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	10.699.251.319,00	5.294.210.058,00	49,48%	3.948.949.359,00	36,91%
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,007,800	17,032,800	42,57%	13,442,500	33,60%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,558,683,652	3,749,568,032	49,59%	3,191,414,564	42,22%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450,480,545	188,786,949	41,91%	126,645,800	28,12%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291,695,000	152,282,000	52,21%	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,791,373,840	920,687,395	51,38%	514,486,195	28,71%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567,010,482	265,852,882	46,88%	102,960,300	18,16%
2	Program Pemberdayaan Sosial	85.000.000,00	31.759.500,00	37,36%	20.951.500,00	24,65%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota	85,000,000	31,759,500	37,36%	20,951,500	24,65%
3	Program Rehabilitasi Sosial	863.400.000,00	327.948.333,00	37,98%	184.085.300,00	21,32%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	818,400,000	312,948,333	38,24%	178,985,300	21,87%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	45,000,000	15,000,000	33,33%	5,100,000	11,33%
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.503.983.700,00	1.645.050.400,00	46,95%	667.710.252,00	19,06%
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	25,000,000	5,000,000	20,00%	0	0,00%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	3,478,983,700	1,640,050,400	47,13%	667,710,252	19,19%

No.	Nama Program	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)
5	Program Penanganan Bencana	170.000.000,00	104.088.000,00	61,23%	15.802.783,00	9,30%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/kota	115,000,000	63,438,000	55,16%	14,303,000	12,44%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	55,000,000	40,650,000	73,91%	1,499,783	27,30%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	70.000.000,00	22.346.498,00	31,92%	-	0,00%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota	70,000,000	22,346,498	31,92%	0	0,00%
7	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	442.010.000,00	179.069.000,00	40,51%	6.563.000,00	1,48%
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota	50,000,000	9,800,000	19,60%	0	0,00%
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	362,010,000	162,314,000	44,84%	6,563,000	1,81%
	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	30,000,000	6,955,000	23,18%	0	0,00%
8	Program Perlindungan Perempuan	172.500.000,00	85.312.500,00	49,46%	127.366.500,00	73,84%
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota	51,000,000	24,325,000	47,70%	48,504,000	95,10%
	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	121,500,000	60,987,500	50,19%	78,862,500	64,91%
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	25.000.000,00	19.500.000,00	78,00%	-	0,00%
	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	25,000,000	19,500,000	78,00%	0	0,00%

No.	Nama Program	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan(%)
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	5.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	5,000,000	0	0,00%	0	0,00%
11	Program Pemenuhan Hak Anak (pha)	140.000.000,00	72.460.000,00	51,76%	100.000,00	0,07%
	Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	40,000,000	21,320,000	53,30%	0	0,00%
	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota	100,000,000	51,140,000	51,14%	100	10,00%
12	Program Perlindungan Khusus Anak	188.860.000,00	88.565.000,00	46,89%	-	0,00%
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota	119,500,000	56,650,000	47,41%	0	0,00%
	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota	69,360,000	31,915,000	46,01%	0	0,00%
	TOTAL	16.365.005.019,00	7.870.309.298,00	48,08%	4.971.528.694,00	30,38%

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran berdasarkan data capaian Triwulan II tahun 2026, terlihat beberapa indikator kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama DinsosP3A dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah N/A dikarenakan belum adanya pengumuman resmi (*given*) dari BPS maupun KemenPPPA. Sedangkan Indikator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 100%. Untuk indikator sasaran Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/Kota capaiannya mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam upaya penanganan anak korban kekerasan. Namun, pada indikator sasaran Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Nilai SPIP Perangkat Daerah, Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah capaiannya baru 0 %, yang dikarenakan nilai yang masih dalam pengolahan.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan progres yang bervariasi sesuai karakteristik masing-masing kegiatan. Sebagian besar kegiatan administrasi dan perencanaan telah mencapai target sesuai jadwal pelaksanaan, sedangkan kegiatan fisik masih menunjukkan capaian yang relatif rendah karena pelaksanaan dan penyerapan anggaran umumnya terrealisasi pada semester kedua.

Beberapa program dan kegiatan yang telah mencapai atau melampaui target didukung oleh kesiapan dokumen perencanaan, kelancaran proses pelaksanaan, serta koordinasi yang efektif antara perangkat daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang optimal turut berkontribusi terhadap percepatan pencapaian target kinerja. Di sisi lain, terdapat program, kegiatan, maupun subkegiatan yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target semester. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh proses persiapan pelaksanaan yang masih berlangsung, keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyesuaian jadwal kegiatan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, seluruh program dan kegiatan masih berada pada jalur pencapaian target tahunan. Perangkat daerah akan terus melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan guna memastikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Dalam tahun anggaran 2026 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada DinsosP3A dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 16.621.275.373,-** dengan 12 (sebelas) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar **Rp. 4.971.528.694,-** atau dengan prosentase sebesar 30,38 %. Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu:

1. Penyerapan terendah pada beberapa Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Anak-anak Terlantar, Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota, Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota, Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota, Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota, Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota dan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota belum adanya realisasi serapan anggaran karena akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV;
2. Penyerapan tertinggi pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota sebanyak 78 %.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dihadapkan dengan berbagai dinamika yang ada. Dimana menjaring perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dilakukan dari permasalahan yang ada dan/atau sebagai hasil evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, sebagai berikut :

1. Cakupan JKN yang belum optimal
2. Rendahnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3. Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan ditangani oleh DinsosP3A berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No.80 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Adapun tantangan atau hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Treats*) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

- *Strength* (Kekuatan), DinsosP3A terdiri dari 89 orang pegawai, yang terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 24 orang PPPK, 18 orang PPPK Paruh Waktu dan 17 orang tenaga *outsourcing*. Sarana dan prasarana yang telah didukung oleh fasilitas yang memadai. Memiliki berbagai program bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat, dan telah memanfaatkan layanan digital dan informasi publik melalui portal resmi.
- *Weakness* (Kelemahan), disamping kekuatan yang dimiliki tentunya ditemukan kelemahan yang harus diperhatikan, dimana keterbatasan anggaran dibandingkan luasnya cakupan permasalahan sosial berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, Integrasi data masih memerlukan penguatan agar lebih akurat dan mutakhir, serta edukasi masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan.
- *Opportunity* (Peluang), tersedianya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta sektor swasta melalui program CSR menjadi penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DinsosP3A. Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan kesetaraan gender.
- *Treats* (Ancaman), beberapa ancaman yang mungkin terjadi antara lain : Adanya perubahan kebijakan yang bersifat dinamis dapat mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan yang telah disusun, Kondisi ekonomi dapat meningkatkan angka kemiskinan dan kebutuhan bantuan sosial, Bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta permasalahan sosial lainnya, serta Validitas data penerima bantuan yang berubah secara dinamis berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh DinsosP3A adalah peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.3. Reviu Terhadap Renja Tahun 2026

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dengan berdasarkan pada penyesuaian kebutuhan anggaran di tahun berjalan.

Proses reviu meliputi penelaahan terhadap kesesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu pendanaan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026 Hasil review atas Renja DinsosP3A Tahun 2026, terdapat beberapa yang memerlukan penyesuaian baik berupa perubahan target kinerja, indikator, pagu anggaran.

1. Penyesuaian indikator serta satuan yang sebelumnya belum ada di Renja Induk 2026 karena masih menggunakan indikator yang lama dan indikator yang baru telah dimasukkan ke dalam Renja Perubahan 2026.
2. Penambahan indikator kegiatan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
3. Perubahan Target yang diinput pada eplanning dan SIPD 2026 dikarenakan ada target kinerja tahun 2026 lebih rendah dari realisasi tahun 2025, penyesuaian target dengan kondisi riil yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dengan hasil desk dengan bidang-bidang serta penyesuaian pagu anggaran yang tersedia.

Adapun hasil reviu terhadap renja tahun 2026 sebagaimana dimaksud di atas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 MATRIKS HASIL REVIU RENJA DINSOSP3A 2026

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
						16.621.275.373		14.565.380.187
	Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS serta Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak		Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%		100%	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,72	65,4		65,4	
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	72,35	63,5		63,5	
			Indek Pembangunan Gender (IPG)	90,01	90,05		90,05	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.391.635.019		13.660.262.683
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	80		80	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	N/A	3,42		3,42	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	N/A	3,6		3,6	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	N/A	-	10.718.881.673	84,07 angka	9.528.383.837
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	N/A	90%		90%	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	N/A	80%		80%	
			Nilai kematangan organisasi	N/A	-		46 angka	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	-		100%	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	100%	7.558.683.652	100%	6.805.428.706
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	N/A	100%		100%	

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	25 Orang/bulan	7.438.923.652	54 Orang/bulan	6.691.248.706
X.XX.01.2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	4 Dokumen	119.760.000	4 Dokumen	114.180.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	100%	465.478.863	100%	485.688.721
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	N/A	2 angka		39 angka	
X.XX.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	4 Paket	30.000.000	4 Paket	30.000.000
X.XX.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	6 Paket	35.954.700	6 Paket	48.449.700
X.XX.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	10 Paket	123.100.000	10 Paket	79.382.658
X.XX.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	6 Paket	73.570.000	6 Paket	84.351.000
X.XX.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	3 Paket	39.334.500	3 Paket	45.035.700
X.XX.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	70 Laporan	145.521.345	70 Laporan	183.471.345
X.XX.01.2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	4 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	-
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	N/A	100%	291.695.000	100%	296.465.000
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%		100%	
X.XX.01.2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	4 Unit	130.645.000	4 Unit	78.915.000
X.XX.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	5 Unit	161.050.000	5 Unit	217.550.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2 Unit	-	0 Unit	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	100 %	1.791.373.840	100 %	1.259.607.931,40
X.XX.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	372.000.000	12 Laporan	218.232.609
X.XX.01.2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Laporan	-	0 Laporan	-
X.XX.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	1.419.373.840	12 Laporan	1.036.743.286,40
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	70%	567.010.482	70%	661.890.979
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%		100%	
X.XX.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	15 Unit	273.555.290	42 Unit	273.555.610,60
X.XX.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	3 Unit	260.000.000	3 Unit	320.800.000
X.XX.01.2.09.0 005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	4 Unit	4.000.000	4 Unit	12.000.176
X.XX.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	7 Unit	29.455.192	7 Unit	55.535.192
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	N/A	100%	40.007.800	100%	19.302.500
			Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	N/A	100%		100%	
X.XX.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	4 Dokumen	14.782.800	4 Dokumen	9.075.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	N/A	4 Laporan	25.225.000	4 Laporan	10.227.500
	Cakupan jenis PPKS yang tertangani		Persentase Jenis PPKS yang tertangani	100%	100%		100%	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	N/A	100%	85.000.000	100%	83.350.000
			Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan Sosial	N/A	57%		57%	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan	7 Lembaga	5 Lembaga	85.000.000	7 Lembaga	83.350.000
1.06.02.2.03.0 003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	5 Keluarga	10.000.000	5 Keluarga	9.350.000
1.06.02.2.03.0 004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	5 Lembaga	50.000.000	5 Lembaga	49.000.000
1.06.02.2.03.0 012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Sertifikat	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000
1.06.02.2.03.0 014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	27 Orang	27 Orang	10.000.000	6 Orang	10.000.000
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Sosial	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan		0 kegiatan	-	0 kegiatan	-
1.06.02.2.01.0 002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		0 keluarga	-	0 keluarga	-

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1.06.02.2.01.0 004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 keluarga	-	0 keluarga	-
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	863.400.000	100%	757.164.000
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	N/A	56,7 Indeks		56,7 Indeks	
			Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia	N/A	54,31 Indeks		54,31 Indeks	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Optimalnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	193 orang	210 orang	818.400.000	190 Orang	736.914.000
			Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	91 orang	53 orang		60 Orang	
			Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	21 orang	88 orang		50 Orang	
1.06.04.2.01.0 001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Orang	350 Orang	330.000.000	300 Orang	330.000.000
1.06.04.2.01.0 002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	143 Orang	150 Orang	50.000.000	150 Orang	50.000.000
1.06.04.2.01.0 003	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Orang	30 Orang	200.000.000	30 Orang	196.850.000
1.06.04.2.01.0 004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	31 Orang	10 Orang	20.000.000	10 Orang	17.000.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
		Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.04.2.01.0 005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	117 Orang	50 Orang	108.400.000	50 Orang	75.004.000
1.06.04.2.01.0 006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000
1.06.04.2.01.0 008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	6 Orang	10.000.000	6 Orang	4.000.000
1.06.04.2.01.0 009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang	5 Orang	-	0 Orang	-
1.06.04.2.01.0 010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	10 Orang	5.000.000	10 Orang	3.000.000
1.06.04.2.01.0 011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang	5 Orang	10.000.000	5 Orang	3.860.000
1.06.04.2.01.0 012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	113 Orang	5 Orang	50.000.000	5 Orang	25.000.000
1.06.04.2.01.0 014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	10 Orang	10.000.000	10 Orang	7.200.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Optimalnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase PPKS lainnya yang mendapat fasilitas rehabilitasi sosial	100 %	100 %	45.000.000	100 %	20.250.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
	HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
1.06.04.2.02.0 003	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25 Orang	10.000.000	25 Orang	12.000.000
1.06.04.2.02.0 004	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	20 Orang	-	0 Orang	-
1.06.04.2.02.0 005	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	10.000.000	5 Orang	4.000.000
1.06.04.2.02.0 006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	10 Orang	-	0 Orang	-
1.06.04.2.02.0 007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	5.000.000	5 Orang	1.250.000
1.06.04.2.02.0 008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	5.000.000	0 Orang	-
1.06.04.2.02.0 009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	4 Orang	3.000.000	0 Orang	-
1.06.04.2.02.0 010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke	0 Orang	4 Orang	3.000.000	0 Orang	-

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
		Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.04.2.02.0 011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	3.000.000	5 Orang	3.000.000
1.06.04.2.02.0 012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	3.000.000	0 Orang	-
1.06.04.2.02.0 013	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	10 Orang	3.000.000	0 Orang	-
1.06.04.2.02.0 014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-
1.06.04.2.02.0 001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-
1.06.04.2.02.0 002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	100%	71,01%	3.503.983.700	71,010 %	3.106.633.700
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah penerima layanan perlindungan sosial bagi anak terlantar	0 Orang	25 Orang	25.000.000	0 Orang	-
1.06.05.2.01.0 001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	15.000.000	0 Orang	-
1.06.05.2.01.0 002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak- Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	5.000.000	0 Orang	-
1.06.05.2.01.0 003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang	5.000.000	0 Orang	-
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang terdata	52963 Orang	60000 Orang	3.478.983.700	48000 Orang	3.106.633.700

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1.06.05.2.02.0 004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	10.000.000	100 Orang	9.000.000
1.06.05.2.02.0 006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1829 Keluarga	1750 Orang	2.924.983.700	1750 Orang	2.924.983.700
1.06.05.2.02.0 008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	12500 Keluarga	13000 Usulan	544.000.000	13000 Usulan	172.650.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/ kota	100 %	100 %	170.000.000	100 %	134.361.500
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya bantuan untuk korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	288 Orang	300 Orang	115.000.000	300 Orang	94.823.500
1.06.06.2.01.0 001	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	306 Orang	160 Orang	70.000.000	250 Orang	63.542.500
1.06.06.2.01.0 002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	100 Orang	25.000.000	100 Orang	19.499.600
1.06.06.2.01.0 004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	169 Orang	20 Orang	5.000.000	100 Orang	2.300.000
1.06.06.2.01.0 005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	85 Orang	15 Orang	5.000.000	30 Orang	3.000.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
		Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.06.2.01.0 007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	25 Orang	10.000.000	160 Orang	6.481.400
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kampung siaga bencana	2 Kali	4 Kampung	55.000.000	4 Kampung	39.538.000
1.06.06.2.02.0 001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	2 Kampung	15.000.000	2 Kampung	14.000.000
1.06.06.2.02.0 002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	102 Orang	40.000.000	102 Orang	25.538.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	70.000.000	100 %	70.000.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemeliharaan Makam Pahlawan	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	865 Makam	865 Makam	70.000.000	865 Makam	70.000.000
1.06.07.2.01.0 002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	865 Makam	865 Makam	70.000.000	865 Makam	70.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.229.640.354		905.117.504
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,193	0,209 - 0,196 angka		0,209 - 0,196 angka	
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/Kota	100%	100%		100%	
			Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	4,65	5,28 angka		4,60 angka	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya implementasi PUG pada Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perempuan yang	N/A	75,21%	442.010.000	75,21%	282.111.650

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
			Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan					
			Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	N/A	-		50,67%	
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	N/A	100%		58,90%	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100 %	29 Perangkat Daerah	50.000.000	100 %	41.369.500
2.08.02.2.01.0 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	25.000.000
2.08.02.2.01.0 007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2 Dokumen	2 Laporan	20.000.000	1 Laporan	16.369.500
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan	0 Organisasi	38 Organisasi	362.010.000	38 Organisasi	210.742.150
2.08.02.2.02.0 003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	36 Organisasi	39 Lembaga	300.000.000	39 Lembaga	178.742.150
2.08.02.2.02.0 008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	4 Dokumen	160 orang	62.010.000	270 orang	32.000.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	N/A	50,82 %	30.000.000	21 %	30.000.000
2.08.02.2.03.0 007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	N/A	47 Lembaga	15.000.000	13 Lembaga	15.000.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
	perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota						
2.08.02.2.03.0 008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	N/A	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprensif	100 %	100 %	269.140.000	100 %	250.440.500
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	56 kasus	47 kasus	51.000.000	47 kasus	51.000.000
			Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan yang terlaksana		-		6 Kegiatan	
2.08.03.2.01.0 004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-
2.08.03.2.01.0 006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	14 Perangkat Daerah	27 Lembaga	51.000.000	10 Lembaga	51.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	10 Kasus	19 Kasus	96.640.000	19 Kasus	96.640.000
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 Lembaga	1 Lembaga	121.500.000	1 Lembaga	102.800.500
2.08.03.2.03.0 005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Dokumen	1 Lembaga	116.500.000	1 Lembaga	97.800.500
2.08.03.2.03.0 009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
		Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0,025%	0,035 %	25.000.000	0,035 %	25.000.000
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000
2.08.04.2.01.0 006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Perangkat Daerah	27 Orang	25.000.000	25 Orang	25.000.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pemanfaatan data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	44,82%	48,27 %	5.000.000	48,27 %	5.000.000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	15 Perangkat Daerah	5.000.000
2.08.05.2.01.0 003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang telah mendapatkan advokasi komponen pemenuhan hak anak	90%	95 %	140.000.000	86 %	16.575.000
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40.000.000	2 Kegiatan	5.125.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
2.08.06.2.01.0 003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Organisasi	27 Lembaga	25.000.000	27 Lembaga	2.300.000
2.08.06.2.01.0 005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	27 Lembaga	15.000.000	27 Lembaga	2.825.000
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	23 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	100.000.000	25 Perangkat Daerah	11.450.000
2.08.06.2.02.0 007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	N/A	27 Lembaga	100.000.000	27 Lembaga	11.450.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Layanan penanganan perlindungan anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprensensif	100 %	100 %	328.860.000	100 %	306.360.000
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Lembaga	3 Lembaga	119.500.000	3 Lembaga	97.000.000
2.08.07.2.01.0 006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	0 Dokumen	2 Dokumen	68.500.000	2 Dokumen	46.000.000
2.08.07.2.01.0 007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi	200 Orang	27 Kegiatan	51.000.000	5 Kegiatan	51.000.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
	pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota					
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	78 Anak	63 Orang	140.000.000	63 Orang	140.000.000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	N/A	-	69.360.000	1 Lembaga	69.360.000
2.08.07.2.03.0 013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	N/A	-	69.360.000	115 Orang	69.360.000
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak							
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.621.275.373		14.565.380.187
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	-	269.140.000	100 %	250.440.500
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	10 Kasus	-	96.640.000	19 kasus	96.640.000
2.08.03.2.02.0 008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		-	96.640.000	50 orang	96.640.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Layanan penanganan perlindungan anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang	100 %	-	328.860.000	100 %	306.360.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
			Mendapatkan Layanan Komprensif					
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyediaan layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		-	140.000.000	6 Layanan	140.000.000
2.08.07.2.02.0 008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		-	140.000.000	63 Orang	140.000.000
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</i>		1 Lembaga	69.360.000	1 Lembaga	69.360.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	10.718.881.673	100 %	9.528.383.837
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	-	465.478.863	100 %	485.688.721
X.XX.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.247.818	1 Paket	5.247.818
X.XX.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1.843.000	1 Paket	1.843.000
X.XX.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.907.500	1 Paket	7.907.500
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	1.796.005.876	100 %	1.259.607.931,40
X.XX.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.632.036	12 Laporan	4.632.036
JUMLAH						16.621.275.373		14.565.380.187

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja DinsosP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja DinsosP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2026

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					22.966.395.476,00	16.621.275.373,00	14.565.380.187,00				
		Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS serta Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak		Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%							
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,4	65,4							
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,5	63,5							
				Indek Pembangunan Gender (IPG)	90,05	90,05							
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					21.831.795.476,00	15.391.635.019,00	13.660.262.683,00				
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					21.831.795.476,00	15.391.635.019,00	13.660.262.683,00				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80							
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,42	3,42							
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,6	3,6							
1,	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai kematangan organisasi Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi IKM Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	80 90 % %	100 % 46 angka 80 % 84,07 angka 90 %	12.331.295.476,00	10.718.881.673,00	9.528.383.837,00				
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	100 %	100 %	144.000.000,00	40.007.800,00	19.302.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	14.782.800,00	9.075.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
													dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	4 Laporan	64.000.000,00	25.225.000,00	10.227.500,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	5.699.164.764,00	7.558.683.652,00	6.805.428.706,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25 Orang/bul an	54 Orang/bul an	5.308.904.764,00	7.438.923.652,00	6.691.248.706,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	390.260.000,00	119.760.000,00	114.180.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	<i>Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 % 2 angka	100 % 39 angka	1.662.485.500,00	465.478.863,00	485.688.721,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	84.485.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
	1.06.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	95.000.000,00	35.954.700,00	48.449.700,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	59.500.000,00	123.100.000,00	79.382.658,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	696.000.000,00	73.570.000,00	84.351.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	85.000.000,00	39.334.500,00	45.035.700,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	592.500.000,00	145.521.345,00	183.471.345,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan	10 % 100 %	100 %	665.999.500,00	291.695.000,00	296.465.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>pengadaan barang miik daerah (RKBMMD) Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</i>								pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	4 Unit	4 Unit	79.999.500,00	130.645.000,00	78.915.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	5 Unit	421.000.000,00	161.050.000,00	217.550.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	0 Unit	165.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	100 %	2.158.545.712,00	1.796.005.876,00	1.259.607.931,40			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	311.138.560,00	372.000.000,00	218.232.609,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	0 Laporan	37.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender,

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
													Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	1.06.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	1.800.407.152,00	1.419.373.840,00	1.036.743.286,40	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 % 70 %	100 % 70 %	2.001.100.000,00	567.010.482,00	661.890.978,60			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	15 Unit	42 Unit	1.117.000.000,00	273.555.290,00	273.555.610,60	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	4.000.000,00	12.000.176,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	7 Unit	7 Unit	254.100.000,00	29.455.192,00	55.535.192,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
													Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	3 Unit	3 Unit	550.000.000,00	260.000.000,00	320.800.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
		Cakupan jenis PPKS yang tertangani		Persentase Jenis PPKS yang tertangani	100%	100%							
2,	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan Sosial	58 %	100 57 % %	935.000.000,00	85.000.000,00	83.350.000,00				
	1.06.02. 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan</i>	5 Lembaga	7 Lembaga	935.000.000,00	85.000.000,00	83.350.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.02. 2.03.00 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	5 Keluarga	5 Keluarga	30.000.000,00	10.000.000,00	9.350.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.02. 2.03.00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	5 Lembaga	5 Lembaga	75.000.000,00	50.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.02. 2.03.00 12	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
	1.06.02. 2.03.00 14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/ atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	27 Orang	6 Orang	800.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
3,	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	100 %	100 % 54,31 Indeks 56,7 Indeks	3.418.000.000,00	863.400.000,00	757.164.000,00				
	1.06.04. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Optimalnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	350 Orang	190 Orang 50 Orang 60 Orang	2.668.000.000,00	818.400.000,00	736.914.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	300 Orang	750.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 03	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	568.000.000,00	200.000.000,00	196.850.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
												kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	50 Orang	350.000.000,00	108.400.000,00	75.004.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	10.000.000,00	3.860.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 12	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.01.00 14	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	10.000.000,00	7.200.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Optimalnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<i>Presentase PPKS lainnya yang mendapat fasilitas rehabilitasi sosial</i>	100 %	100 %	750.000.000,00	45.000.000,00	20.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
	1.06.04. 2.02.00 03	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.02.00 04	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.02.00 05	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.02.00 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.02.00 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.02.00 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	<i>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang</i>	5 Orang	0 Orang	50.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
		Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota						Purwokerto Barat, Kober		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	0 Orang	50.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	0 Orang	50.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0 Orang	50.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang	50.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
												prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.04. 2.02.00 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
4,	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial	71,010 %	71,010 %	3.477.500.000,00	3.503.983.700,00	3.106.633.700,00				
	1.06.05. 2.01	Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah penerima layanan perlindungan sosial bagi anak terlantar	25 Orang	0 Orang	252.500.000,00	25.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.05. 2.01.00 01	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak- anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Orang	0 Orang	80.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.05. 2.01.00 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Orang	0 Orang	82.500.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.05. 2.01.00 03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Orang	0 Orang	90.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
	1.06.05. 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin	<i>Jumlah fakir miskin yang terdata</i>	60000 Orang	48000 Orang	3.225.000.000,00	3.478.983.700,00	3.106.633.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.05. 2.02.00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100 Orang	100 Orang	125.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.05. 2.02.00 06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1750 Orang	1750 Orang	2.500.000.000,00	2.924.983.700,00	2.924.983.700,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEBKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.05. 2.02.00 08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	<i>Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan</i>	13000 Usulan	13000 Usulan	600.000.000,00	544.000.000,00	172.650.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
5,	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	1.610.000.000,00	170.000.000,00	134.361.500,00				
	1.06.06. 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya bantuan untuk korban bencana	<i>Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota</i>	300 Orang	300 Orang	1.160.000.000,00	115.000.000,00	94.823.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.06. 2.01.00 01	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	160 Orang	250 Orang	490.000.000,00	70.000.000,00	63.542.500,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
			Kewenangan Kabupaten/Kota										Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.06. 2.01.00 02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang	100 Orang	180.000.000,00	25.000.000,00	19.499.600,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.06. 2.01.00 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Orang	100 Orang	100.000.000,00	5.000.000,00	2.300.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.06. 2.01.00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	30 Orang	90.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.06. 2.01.00 07	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 Orang	160 Orang	300.000.000,00	10.000.000,00	6.481.400,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.06. 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kampung siaga bencana	4 Kampung	4 Kampung	450.000.000,00	55.000.000,00	39.538.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.06. 2.02.00 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Kampung	2 Kampung	150.000.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
													Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.06. 2.02.00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	102 Orang	102 Orang	300.000.000,00	40.000.000,00	25.538.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
6,	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Presentase makam pahlawan yang dikelola	100 %	100 %	95.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00				
	1.06.07. 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemeliharaan Makam Pahlawan	<i>Jumlah makam pahlawan yang dipelihara</i>	865 Makam	865 Makam	95.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	1.06.07. 2.01.00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota</i>	865 Makam	865 Makam	95.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,209 - 0,196 angka	0,209 - 0,196 angka							
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/ Kota	100%	100%							
				Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	5,28 angka	4,60 angka							
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.134.600.000,00	1.229.640.354,00	905.117.504,00				
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.134.600.000,00	1.229.640.354,00	905.117.504,00				

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
1,	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya implementasi PUG pada Pemerintah Daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan	100 % 75,21 %	50,67 % 58,9 % 75,21 %	310.000.000,00	442.010.000,00	282.111.650,00				
	2.08.02. 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	29 Perangkat Daerah	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	41.369.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.02. 2.01.00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.02. 2.01.00 07	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	16.369.500,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
													Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan</i>	38 Organisasi	38 Organisasi	190.000.000,00	362.010.000,00	210.742.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>	39 Lembaga	39 Lembaga	150.000.000,00	300.000.000,00	178.742.150,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi</i>	160 orang	270 orang	40.000.000,00	62.010.000,00	32.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
													Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.02. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan</i>	50,82 %	21 %	70.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.02. 2.03.00 07	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan</i>	47 Lembaga	13 Lembaga	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.02. 2.03.00 08	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</i>	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
													Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
2,	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	100 %	270.000.000,00	269.140.000,00	250.440.500,00				
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti <i>Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan yang terlaksana</i>	47 kasus	47 kasus 6 Kegiatan	80.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/ Kota	27 Lembaga	10 Lembaga	50.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan</i>	19 kasus	19 kasus	110.000.000,00	96.640.000,00	96.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi</i>	1 Lembaga	1 Lembaga	80.000.000,00	121.500.000,00	102.800.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.03.2.03.00.05	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	1 Lembaga	1 Lembaga	55.000.000,00	116.500.000,00	97.800.500,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.03. 2.03.00 09	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
3,	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0,035 %	0,035 %	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00				
	2.08.04. 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -
	2.08.04. 2.01.00 06	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/k	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kot	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	27 Orang	25 Orang	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	- -

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
		ota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	a, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.									generasi Z), dan penyandang disabilitas.	
4,	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pemanfaatan data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	48,27 %	48,27 %	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00				
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan	1 Laporan	15 Perangkat Daerah	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.05.2.01.00 03	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
5,	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang telah mendapatkan advokasi komponen pemenuhan hak anak	95 %	86 %	90.000.000,00	140.000.000,00	16.575.000,00				
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	5.125.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender,

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota									kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.06. 2.01.00 03	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	27 Lembaga	27 Lembaga	20.000.000,00	25.000.000,00	2.300.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.06. 2.01.00 05	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	27 Lembaga	27 Lembaga	20.000.000,00	15.000.000,00	2.825.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.06. 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	<i>Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak</i>	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00	11.450.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender,

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota									kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.06. 2.02.00 07	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	27 Lembaga	27 Lembaga	50.000.000,00	100.000.000,00	11.450.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
6,	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Layanan penanganan penanganan anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	100 %	364.600.000,00	328.860.000,00	306.360.000,00				
	2.08.07. 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Lembaga	3 Lembaga	64.600.000,00	119.500.000,00	97.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
	2.08.07. 2.01.00 06	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	<i>jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	34.600.000,00	68.500.000,00	46.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.07. 2.01.00 07	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota</i>	27 Kegiatan	5 Kegiatan	30.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.07. 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan</i>	63 Orang	63 Orang	200.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
	2.08.07. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-	1 Lembaga	100.000.000,00	69.360.000,00	69.360.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.07. 2.03.00 13	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan bimtek	-	115 Orang	0,00	69.360.000,00	69.360.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					22.966.395.476,00	16.621.275.373,00	14.565.380.187,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.134.600.000,00	1.229.640.354,00	905.117.504,00				
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.134.600.000,00	1.229.640.354,00	905.117.504,00				
1,	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	12.331.295.476,00	10.718.881.673,00	9.528.383.837,00				
	1.06.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	1.662.485.500,00	465.478.863,00	485.688.721,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
												sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	1.06.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.247.818,00	5.247.818,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	1.06.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	1.06.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.907.500,00	7.907.500,00	Kab. Banyumas, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
										Kecamatan, Semua Kel/Desa		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-	100 %	2.158.545.712,00	1.796.005.876,00	1.259.607.931,40			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	1.06.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	4.632.036,00	4.632.036,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
2,	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan	-	100 %	270.000.000,00	269.140.000,00	250.440.500,00				

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
				TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif									
	2.08.03. 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan</i>	-	19 kasus	110.000.000,00	96.640.000,00	96.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	2.08.03. 2.02.00 08	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>	-	50 orang	0,00	96.640.000,00	96.640.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
3,	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Layanan penanganan perlindungan anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-	100 %	364.600.000,00	328.860.000,00	306.360.000,00				
	2.08.07. 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah jenis penyediaan layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>	-	6 Layanan	200.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	2.08.07. 2.02.00 08	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>	-	63 Orang	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi Meningkatkan Penanganan Kemiskinan dan Pelayanan Perlindungan Sosial Secara Terintegrasi
	2.08.07. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</i>	1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	69.360.000,00	69.360.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta

NO	KODE	Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
					TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026			NASIONAL	DAERAH
												(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	2.08.07. 2.03.00 13	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek</i>	115 Orang	115 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda Meningkatkan Pembangunan Keluarga yang Memperhatikan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal, Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Masyarakat Secara Inklusif, Serta Peningkatan Peran Aktif Pemuda
	J U M L A H						22.966.395.476,00	16.621.275.373,00	14.565.380.187,00				

Tabel 3.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2026
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
5	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100
6	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100
7	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
8	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100

* Berdasarkan KEPMENDAGRI NOMOR 100.2.1.7-109 TAHUN 2026

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DinsosP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan DinsosP3A Tahun 2026. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada DinsosP3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan DinsosP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2026, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

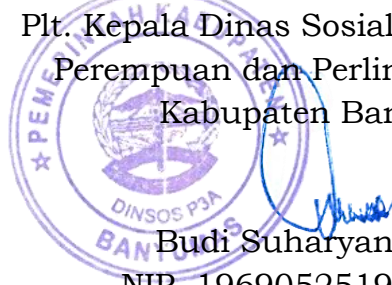
1. Rencana Kerja Perubahan DinsosP3A Tahun 2026 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. DinsosP3A dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja DinsosP3A Tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi serta mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Banyumas, telah disusun Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko sebagai bagian dari Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penyusunan register risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus menetapkan langkah-langkah penanganan yang tepat guna meminimalkan dampak risiko tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan Renja Perubahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mendukung tercapainya target kinerja organisasi dan prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyumas



Budi Suharyanto, S.H.

NIP. 196905251990021001

LAMPIRAN

Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional 2026

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Pemilik/ Penanggung Jawab	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat bantuan sosial	Data Penerima Manfaat tidak akurat/tidak mutakhir	Risiko Operasional	Eksternal	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data tidak diperbarui secara berkala, validasi dan verifikasi lapangan terbatas serta perubahan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat tidak terdata	Bantuan tidak tepat sasaran	Mengintensifkan verifikasi dan validasi data lapangan
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantl 2. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia 3. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Melakukan pendataan PPKS yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial, kemudian melakukan asesmen, menganalisis kebutuhan, dan memberikan pelayanan baik yang ada di rumah singgah maupun rujukan ke panti pelayanan sosial milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah maupun ke Sentra Kementerian Sosial	Kurangnya data dan pendataan secara akurat penyandang disabilitas, anak, lansia terlantar, gelandangan pengemis	Risiko Operasional	Internal	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	Kurangnya data dan pendataan secara akurat penyandang disabilitas, anak, lansia terlantar, gelandangan pengemis	PPKS tidak terdata dan tertangani sesuai kebutuhannya	Peningkatan kapasitas SDM
						Kualitas makanan untuk PPKS tidak memenuhi standar gizi	Risiko Operasional	Internal	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	Spesifikasi standar gizi dan menu belum ditetapkan secara jelas	Kebutuhan gizi penerima manfaat tidak terpenuhi	Pemeriksaan rutin kualitas, kebersihan, dan porsi makanan

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Pemilik/ Penanggung Jawab	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
						dan kesehatan						
3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Penyaluran bantuan (makanan, sandang), serta pendampingan sosial bagi korban terdampak	Keterbatasan sumber daya dan logistik terhadap penanganan korban bencana alam dan sosial	Risiko Operasional	Eksternal dan Internal	Kabid Perlindungan dan Jamianan Sosial	1. Terbatasnya SDM yang terlatih 2. Infrastruktur yang rusak akibat bencana	Terlambatnya proses penyaluran bantuan kepada korban bencana serta penurunan kualitas dan kuantitas bantuan	Penguatan koordinasi lintas sektor (BPBD, Dinkes, TNI/Polri, relawan)
4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Penerimaan pengaduan sesuai SOP,Identifikasi jenis kasus, kriteria risiko dan kewenangan, Assesment biopsikososial masalah dan kebutuhan korban serta memberikan dukungan psikososial awal, Rekomendasi layanan dan penyusunan intervensi layanan, Input data ke dalam simfoni	Terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam permasalahan kasus kekerasan terhadap perempuan	Risiko Operasional	Internal	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kurangnya advokasi/ sosialisasi kepada masyarakat	Semakin banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi	Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui upaya Sosialisasi dan Advokasi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Penerimaan pengaduan sesuai SOP,Identifikasi jenis kasus, kriteria risiko dan kewenangan, Assesment biopsikososial	Kompetensi Petugas dalam Pelayanan Kasus di UPTD PPA maupun jejaringnya belum maksimal	Risiko Operasional	Internal	Kepala UPTD	Kurangnya update dan suplai pengetahuan mengenai mekanisme pelayanan kasus kekerasan	Kualitas pelayanan kasus tidak maksimal	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Pemilik/ Penanggung Jawab	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
			daerah kab/kota		masalah dan kebutuhan korban serta memberikan dukungan psikososial awal, Rekomendasi layanan dan penyusunan intervensi layanan, Input data ke dalam simfoni							bantuan hukum, dan instansi terkait dalam peningkatan kapasitas petugas
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Nilai kematangan organisasi 3. Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi 4. IKM Perangkat Daerah 5. Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase kesesuaian program renja dengan DPA 2. Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Manipulasi target kinerja	Risiko Kecurangan (Kecurangan dalam pelaporan)	Internal	Sekretariat	1. Tekanan dari pihak lain 2. Data capaian kinerja tahun sebelumnya tidak valid atau tidak mutakhir	penurunan kinerja	Meningkatkan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian